

CENDEKIA WASKITA

JURNAL KAJIAN STRATEGIS

VOL.6 NO.1 JULI 2022



STIN PRESS
Cijayanti, Sentul, Jawa Barat

JURNAL
CENDEKIA
WASKITA

VOLUME 6

NOMOR 1

HALAMAN
1-131

BOGOR
JULI
2022

ISSN
24068-713

DAFTAR ISI

Analisis Kebijakan Luar Negeri Indonesia Dalam Menyikapi Invasi Rusia Ke Ukraina.....	1
ABSTRAK.....	1
ABSTRACT	1
PENDAHULUAN	2
TINJAUAN PUSTAKA	3
Keamanan.....	4
Intelijen Strategis.....	4
METODE PENELITIAN	5
HASIL PENELITIAN	5
Perlindungan WNI di Luar Negeri	7
Indonesia Abstain pada Voting Penangguhan Keanggotaan Rusiadari Keanggotaan Dewan HAM...7	
SIMPULAN.....	8
SARAN.....	9
DAFTAR PUSTAKA	9

Analisis Kebijakan Luar Negeri Indonesia Dalam Menyikapi Invasi Rusia Ke Ukraina

M. Yusuf Samad, Diah Ayu Permatasari

ABSTRAK

Invasi Rusia ke Ukraina telah berlangsung sejak akhir Februari lalu dan sejumlah negara menyikapi invasi tersebut dengan mengutuk aksi Rusia hingga memberikan sanksi kepada Rusia, Indonesia juga turut merespons invasi tersebut dengan mengeluarkan kebijakan luar negerinya. Penelitian ini menganalisis kebijakan luar negeri Indonesia dalam menyikapi invasi Rusia ke Ukraina dengan menggunakan sejumlah teori dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kebijakan luar negeri Indonesia dalam menyikapi invasi Rusia ke Ukraina masih konsisten dalam menerapkan prinsip bebas aktif dengan mengedepankan perdamaian dunia melalui diplomasi. Kebijakan ini diiringi dengan upaya-upaya Indonesia dalam mewujudkan kepentingan nasionalnya seperti perlindungan WNI berupa evakuasi dari wilayah Ukraina hingga mengamankan sektor ekonomi imbas dari invasi atau menjaga stabilitas ketahanan pangan di Indonesia. Selain itu, sikap lain yang ditunjukkan oleh Indonesia adalah abstain dari *voting* PBB dengan pertimbangan menunggu hasil penyelidikan PBB untuk menentukan sikap selanjutnya terkait Invasi Rusia ke Ukraina. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri mengaktualisasikan prinsip bebas aktif dengan melakukan *shuttle diplomacy* atau diplomasi bolak balik sebagai upaya mediasi dalam mewujudkan perdamaian dunia.

Kata Kunci: Invasi, Kebijakan Luar Negeri, Rusia, Ukraina.

ABSTRACT

The Russian invasion of Ukraine has been going on since the end of last February and a number of countries responded to the invasion by condemning Russia's actions and imposing sanctions on Russia, Indonesia also responded to the invasion by issuing its foreign policy. This study analyzes Indonesia's foreign policy in responding to the Russian invasion of Ukraine by using a number of theories with a qualitative approach. The results show that Indonesia's foreign policy in responding to the Russian invasion of Ukraine is still consistent in applying the principle of being free and active by prioritizing world peace through diplomacy. This policy is accompanied by Indonesia's efforts to realize its national interests, such as protecting Indonesian citizens in the form of evacuating from the territory of Ukraine to securing the economic sector affected by the invasion or maintaining the stability of food security in Indonesia. In addition, another attitude shown by Indonesia was abstaining from the UN vote with the consideration of waiting for the results of the UN investigation to determine the next position regarding the Russian invasion of Ukraine. The Indonesian government through the Ministry of Foreign Affairs actualizes the principle of being free and active by conducting shuttle diplomacy as a mediation effort in realizing world peace.

Keywords: Invasion, Foreign Policy, Russia, Ukraine

PENDAHULUAN

Indonesia selaku bagian dari komposisi internasional dengan melaksanakan tugas-tugas sistemik dan memahami tugas tersebut sesuai dengan kepentingan domestik dengan mempertimbangkan kemampuan yang dimiliki kemudian merumuskan dan menetapkan kebijakan luar negeri. (Yeremia, et al, 2021).

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri menjelaskan bahwa politik luar negeri bebas aktif bukanlah politik netral, tetapi politik luar negeri yang bebas menentukan sikap dan kebijaksanaan terhadap isu-isu internasional. Prinsip politik ini tidak mengikat diri pada satu kekuatan dunia tertentu. Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi mengaskan bahwa prinsip bebas aktif masih relevan hingga saat ini karena prinsip ini dapat membawa Indonesia dapat mengatakan 'ya' atau 'tidak' ketika merespons suatu kejadian yang terjadi di dunia (Aura, 2021).

Munculnya aliansi dan Politik Luar Negeri Bebas Aktif tidak bisa berjalan beriringan karena keduanya saling bertolak belakang. Namun dengan berbagai ancaman yang datang dan kemampuan pertahanan yang belum mencapai kekuatan esensial minimum, Indonesia menurut sejarahnya mampu mengambil langkah berbeda dengan politik luar negeri bebas aktifnya. Dalam rangka kerja sama di bidang pertahanan dengan salah satu poros terkuat di dunia dengan melakukan seperti *Strategic Partnership*. Meski begitu, kemampuan aliansi pada masa kini akan dapat dimanfaatkan oleh Indonesia sebagai *Deterrence Effect* bagi negara-negara saingan, atau semacamnya untuk meningkatkan posisi tawar Indonesia dalam ranah

diplomasi di dunia, terutama bagi negara-negara yang menyebarkan ancaman terhadap kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Santoso & Marnani, 2020).

Politik luar negeri Indonesia menciptakan peluang dan memberikan kesempatan kepada Indonesia untuk menjalin koneksi dengan berbagai negara tanpa dibatasi oleh disparitas agama, ekonomi, ideologi, sosial budaya, dan hingga politik. Bahkan Presiden Jokowi dengan gambling menunjukkan bahwa asas-asas bebas aktif masih menjadi pondasi yang nyata bagi kebijakan luar negeri Indonesia, dengan catatan akan diselaraskan dengan kondisi terkini (Maksum, 2016).

Kiprah Indonesia dalam dunia internasional sudah tidak diragukan lagi. Peran Indonesia dalam menjalankan kepentingan nasionalnya di dunia internasional terlihat ketika Indonesia turut dalam menciptakan perdamaian dunia. Upaya penyelesaian konflik Rohingya merupakan bagian dari kepentingan nasional Indonesia. Hal itu dapat tercapai dengan menggunakan diplomasi yang memiliki beberapa nilai pragmatisme. Indonesia seharusnya terus menjaga penerapan kebijakan bebas aktif yang selalu mudah menyesuaikan dengan situasi terkini agar upaya diplomasi dapat berjalan tanpa kendala, seperti pada upaya penyelesaian konflik Rohingya, perhelatan internasional juga dapat berjalan dengan saksama dan kepentingan nasional Indonesia dapat terjamin (Matthew, 2020).

Dalam perkembangan dinamika konflik di Myanmar, kebijakan luar negeri Indonesia dalam merespons isu Rohingya memberikan gambaran bagaimana Indonesia menerjemahkan prinsip bebas aktif, yakni tidak

bergantung dan berpihak pada Amerika Serikat atau Cina. Pemerintah Indonesia bersikap moderat (bukan berarti netral) dan tidak bersungguh-sungguh dalam mengaktualisasikan kebijakan luar negeri melalui konsisten dan komitmen tinggi dalam memperjuangkan penyelesaian konflik di Myanmar secara utuh (Djumadi, dkk, 2020).

Kebijakan Indonesia dalam konflik Mesir merupakan bebas aktif dengan penyelesaian konflik yang mengedepankan kepentingan nasional Indonesia berupa penyelesaian konflik secara damai melalui mediasi (Kamal, 2017).

Kebijakan luar negeri Indonesia memiliki peran vital dalam penyelesaian konflik sejumlah negara. Oleh karena itu kebijakan tersebut juga perlu diputuskan dalam invasi Rusia ke Ukraina yang telah terjadi sejak awal tahun 2022. Pada 24 Februari 2022, pasukan Rusia menginvasi Ukraina mengakibatkan banyak korban dari konflik ini dan akan bertambah seiring konflik berlangsung. Pada 1 Maret, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengkonfirmasi sebanyak 136 kematian warga sipil, termasuk 13 anak-anak. Jumlah sebenarnya mungkin jauh lebih tinggi dari yang dilaporkan oleh PBB. (United Nation, 2022).

Artikel Leon, dkk (2022) menunjukkan bahwa invasi bukan hanya tentang Ukraina dan Rusia. Ancaman ekspansi Rusia memiliki konsekuensi besar bagi keamanan global dan pembangunan berkelanjutan, bertepatan dengan krisis lain yang dihadapi umat manusia termasuk perubahan iklim dan prospek pandemi di masa depan.

Artikel lain menyebutkan bahwa invasi ke Ukraina hanyalah upaya terbaru Rusia untuk mempengaruhi

politik di negara lain (McKee & Murphy, 2022). Oleh karena itu, penulis menganalisis bagaimana peran Indonesia melalui kepentingan nasionalnya dalam menyikapi invasi Rusia ke Ukraina. Artikel ini menyajikan bagaimana langkah-langkah Indonesia selama invasi berlangsung di Ukraina.

TINJAUAN PUSTAKA

Analisis Kebijakan Luar Negeri

Analisis jenis ini berupa riset mengenai pengelolaan hubungan luar negeri dan aktivitas negara-bangsa, yang membedakannya dari kebijakan dalam negeri. Kebijakan luar negeri mengikutsertakan kekuatan, tujuan, petunjuk, arah, strategi, dan pemahaman dalam melakukan aktivitas internasional baik itu aktor nonnegara maupun organisasi internasional (Kartini, 2016).

Kebijakan luar negeri adalah ide atau tindakan yang disusun oleh para pembuat kebijakan guna menyelesaikan suatu permasalahan serta memberikan suatu respons terhadap dinamika dalam lingkungan internasional dengan melakukan penyampaian kebijakan, sikap bahkan tindakan yang disesuaikan pada pertimbangan tertentu guna mencapai berbagai tujuan yang akan dicapai (Fauzi, 2017).

Kajian analisis kebijakan luar negeri dapat diamati dari pertanyaan yang diusulkan sebagaimana diungkapkan oleh Doty dalam artikelnya. Pendekatan konvensional analisis kebijakan luar negeri yang dikeluarkan oleh negara biasanya diprioritaskan untuk menjawab jenis pertanyaan mengapa. Jawabannya berupa penjabaran kedudukan dari negara tersebut dalam hierarki kapasitas global, pemahaman dari pengambil kebijakan suatu negara

tersebut atau tarik menarik kepentingan pada aktor-aktor suatu negara (Doty, 2006).

Dalam penelitian Zahidi (2020) mengenai analisis kebijakan luar negeri Vanuatu terhadap dukungan kemerdekaan Papua, disimpulkan bahwa dukungan yang diberikan oleh Vanuatu berasal dari faktor internal atau politik domestik Vanuatu yang sebagian besar mendukung independensi Papua. Selain itu, dorongan *United Liberation Movement for West Papua* (ULMWP) dalam kerangka *melanesian brotherhood* sebagai faktor eksternal.

Artikel lain yang membahas tentang analisis kebijakan luar negeri yaitu penelitian Sari, dkk (2020) yang membahas tentang kebijakan politik luar negeri Indonesia yang memediasi konflik Arab Saudi-Iran.

Keterlibatan Indonesia dimaksudkan untuk membantu upaya penyelesaian konflik dua negara tersebut secara damai agar tidak berpengaruh besar terhadap negara-negara tetangga. Alasan Indonesia memutuskan bersedia sebagai mediator konflik antara Arab Saudi dengan Iran dikarenakan adanya dukungan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dengan menggelar konferensi Organisasi Kerjasama Islam (OKI) untuk mendamaikan kedua negara yang berkonflik, serta perumusan kebijakan luar negeri Indonesiayang disesuaikan dengan nilai-nilai dasar nasional yang didasarkan pada UU Hubungan Luar Negeri untuk diabdikan sebagai kepentingan nasional yaitu kepentingan ekonomi perdagangan Indonesia dan kepentingan sosial terhadap perlindungan WNI di kawasan TimurTengah.

Karakter kebijakan keamanan Indonesia yang tidak memihak

merupakan menjadi modal bagi Indonesia untuk menengahi konflik AS dan Cina di Laut Cina Selatan, sembari menjadi kapabilitas bagi Indonesia agar dapat dipercaya bagi semua pihak yang berseteru (Pedrason, 2020).

Keamanan

Karya Barry Buzan menjadi bahan rujukan bagi bahasan yang berkaitan dengan keamanan. Sebanyak tiga karya Barry Buzan yang berkaitan dengan keamanan, karya terbitan tahun 1991, dan karya kolaborasi terbitan tahun 1998, dan karya kolaborasi terbitan tahun 2009. Buzan menjabarkan konsep keamanan secara bertingkat mulai dari level terkecil yakni level individu, level negara dan level terbesar yakni internasional (Buzan, 1991). Sedangkan arti keamanan secara ringkas Buzan et.al menyatakan bahwa *security is about survival*, mengenai kemampuan negara dalam bertahan untuk tetap eksis. Konsep ini menjadi rujukan secara luas oleh para peneliti keamanan untuk memulai definisi tentang keamanan nasional. Selain tingkat keamanan, Buzan et.al., menganalisis keamanan dari lima aspek, yaitu societal, militer, lingkungan, politik, dan ekonomi (Buzan, dkk, 1998).

Intelijen Strategis

Menurut Johnson (2007), intelijen strategis adalah penggalangan informasi dan upaya-upaya yang membangun analisis terhadap hal yang strategis. Intelijen strategis berawal dari kebutuhan dan asumsi mengenai daya analisis, daya prediksi, dan daya adaptasi terhadap titik-titik ancaman terhadap keamanan nasional. Pendekatan intelijen strategis memperhitungkan konteks sejarah

dalam membangun analisis sebagai upaya untuk memotret suatu konteks motivasi, akar-akar suatu nilai, dan konflik baik yang laten maupun manifes. Pendekatan intelijen strategis tidak hanya dipahami dalam hal pola dan cara yang diambil, melainkan kemampuan dalam memahami inti dari suatu pergerakan atau situasi. Intelijen strategis menjadi masukan penting bagi pengambil kebijakan khususnya terkait keamanan nasional (Pratomo, 2021).

Organizational Process Model

Model ini menitikberatkan bahwa pembuatan keputusan kebijakan luar negeri merupakan proses mekanis dan bukan cuma proses berpikir jernis berdasarkan ilmu pengetahuan. Artinya, pembuatan keputusan mengacu pada pembuatan keputusan yang lama di masa sebelumnya, merupakan *Standard Operating Procedure* (SOP) atau sebuah rutinitas yang telah dijalankan sebelumnya. Pada umumnya, model ini mengasumsikan bahwa jika menggunakan model proses organisasi maka dapat memprediksi kejadian pada suatu waktu dengan mengamati kejadian yang telah terjadi sebelumnya (Allison, 1969).

METODE PENELITIAN

Penelitian kualitatif menjadi pilihan penulis untuk mengkaji lebih dalam tentang sikap Indonesia dalam invasi Rusia ke Ukraina. Proses penelitian ini berawal dari pemilihan proyek penelitian. Selanjutnya mengemukakan pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan proyek penelitian, kemudian mengumpulkan data yang terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang ada dan diakhiri dengan analisis. Proses ini berlangsung berkali-kali dan

berulang, bergantung pada cakupan dan sejauh mana keperluan dari pertanyaan-pertanyaan penelitian yang ada. Penelitian kualitatif bersifat terbuka terhadap peluang melakukan desain ulang, serta akumulasi dan analisis data berjalan serentak. Dalam penelitian ini, teknik analisis data difokuskan untuk menguji hipotesis yang telah disusun sebelumnya atau menjawab pertanyaan penelitian (Hardani, dkk, 2020).

HASIL PENELITIAN

Pernyataan Resmi Kementerian Luar Negeri

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri (Kemlu) telah memberikan pernyataan resmi dalam menanggapi invasi Rusia ke Ukraina. Pernyataan tersebut diunggah oleh akun Twitter resmi milik Kemlu (@Kemlu_RI). Pernyataan tersebut diunggah pada hari yang sama dengan pengumuman Rusia menginvasi Ukraina, yakni pada 24 Februari 2022. Selengkapnya dapat dilihat pada utas yang diunggah oleh akun Twitter @Kemlu_RI.



Gambar 1. Pernyataan resmi Kementerian Luar Negeri RI terkait invasi Rusia ke Ukraina.

Sumber:

https://twitter.com/kemlu_ri/status/1496892360973713413?s=21&t=6i2T4pf1QD_Fx xZNyH0zsg diakses pada 11 April 2022.

Berdasarkan konsep keamanan menurut Buzan (1991), pemerintah Indonesia cenderung pada tingkat keamanan internasional. Sikap Indonesia berupaya untuk mewujudkan perdamaian duniadengan mengedepankan diplomasi. Sikap ini merupakan sikap yang konsisten diterapkan oleh Indonesia seperti pada konflik-konflik

internasional yang pernah terjadi seperti konflik Mesir, Arab Saudi-Iran, hingga Laut Cina Selatan.

Invasi Rusia ke Ukraina berdampak pada kenaikan harga pangan dan komoditas yang signifikan. Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebutkan bahwa sejatinya perang memberikan dua akibat. Pertama, penerimaan ekspor nasional yang naik. Kedua, dampak ke dalam negeri yang hasil akhir dirasakan masyarakat, seperti kenaikan harga pangan dan komoditas (Hakim, 2022). Desakan Indonesia kepada Dewan Keamanan PBB untuk mencegah situasi perang yang semakin memburuk, merupakan upaya Indonesia untuk menjalankan kepentingan nasionalnya berupa mewujudkan ketahanan pangan sesuai dengan UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang menyebutkan bahwa

“Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan

terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan”.

Merujuk pada konsep keamanan Buzan, dkk (1998), Indonesiaberupaya mengamankan sektor ekonomi dengan cara mendorong penyelesaian konflik agar kondisi global stabil dan kegiatan perekonomian secara internasional berjalan normal sehingga berdampak pada terwujudnya ketahanan pangandi Indonesia dan terjangkau oleh masyarakat, dalam hal ini harga pangan yang murah.

Selain pernyataan resmi Kemlu melalui akun media sosialnya, kebijakan luar negeri Indonesia juga disampaikan oleh Direktur Eropa II Kementerian Luar Negeri Winardi Hanafi Lucky pada sebuah Webinar yang berkaitan dengan invasi Rusia ke Ukraina. Winardi menegaskan bahwa Indonesia berprinsip bebas aktif dalam merespons krisis yang terjadi diUkraina akibat invasi Rusia. Prinsip ini bukan berarti Indonesia netral, tetapi lebih kepada Indonesia bebas menentukan sikap berdasarkan kepentingan nasional. Indonesia memandang bahwa upaya terbaik terhadap invasi Rusia ke Ukraina adalah penurunan aktivitas atau deeskalasi sehingga dapat berjalan efektif dan membuka peluang untuk pembukaan jalur kemanusiaan. Pemerintah Indonesia menegaskan tetap menjalin hubungan baik dengan Rusia dan Ukraina karena keduanya adalah sahabat Indonesia (Katriana, 2022).

Indonesia adalah salah satu entitas dalam komposisi internasional yang sejak proklamasi kemerdekaan. Indonesia melalui prinsip bebas aktif, secara terus menerus berkontribusi

dalam penyelesaian sejumlah konflik internasional (Antuli, dkk, 2019). Prinsip bebas aktif yang diterapkan Indonesia merupakan prinsip yang sama dilakukan oleh Indonesia pada sejumlah konflik yang terjadi di beberapa negara, seperti penyelesaian konflik secara damai di Mesir, sikap moderat pada penyelesaian konflik di Myanmar, dan posisi Indonesia dalam rivalitas Amerika Serikat dan Cina di Laut Cina Selatan. Jika dikaitkan dengan Model Proses Organisasi Graham T Allison, prinsip bebas aktif merupakan keputusan yang merujuk kepada penyusunan keputusan yang lama di masa lampau mengingat prinsip bebas aktif ini sudah ada sejak kemerdekaan Indonesia dan masih sangat relevan untuk menghadapi dinamika politik regional dan internasional (Armandha, 2018).

Perlindungan WNI di Luar Negeri

Berdasarkan Press Briefing Menlu RI yang diunggah pada situs web resmi Kemlu RI, Pemerintah Indonesia telah melakukan evakuasi terhadap 9 Warga Negara Indonesia (WNI) melalui jalur Kyiv, kemudian ke Lviv dan kemudian menyeberang ke wilayah Polandia dan sejumlah WNI tersebut dinyatakan sudah berada di zona aman. Dengan telah dievakuasinya 9 WNI dari Chernihiv, maka 133 WNI telah dievakuasi dengan selamat dari Ukraina. Dengan demikian, seluruh proses evakuasi sudah dapat dilaksanakan. Terdapat 23 WNI yang memilih tinggal di Ukraina dengan dominasi alasan keluarga. Selain itu, 9 staf esensial KBRI saat ini berada di Kota Lviv. (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2022).

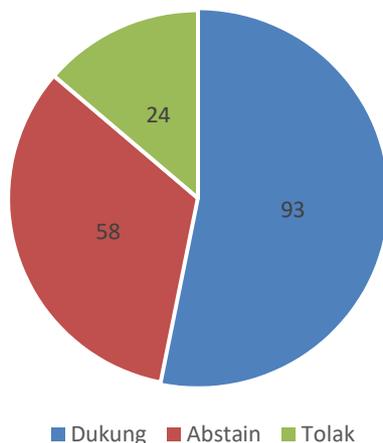
Evakuasi yang dilakukan terhadap WNI di Ukraina merupakan upaya untuk menjalankan kepentingan

nasional Indonesia sesuai dengan amanah preambule UUD 1945 pada Alinea ke-4 yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Hal ini juga sesuai dengan prioritas diplomasi Indonesia yaitu perlindungan warga negara Indonesia atau WNI yang berada diluar negeri. Prioritas tersebut sejalan dengan pasal 1 Permenlu Nomor 5 Tahun 2018, perlindungan warga negara Indonesia (WNI) di luar negeri adalah segala upaya yang dilakukan untuk melayani dan melindungi kepentingan warga negara Indonesia di luar negeri (Miranti, 2021). Merujuk pada *Organizational Process Model*, perlindungan WNI di Ukraina merupakan salah satu *Standard Operating Procedure* Pemerintah Indonesia dalam menyikapi konflik di kancah internasional sehingga perlu dilakukan. Upaya ini sama seperti yang dilakukan oleh Indonesia konflik di Afganistan, saat itu Pemerintah Indonesia telah berhasil mengevakuasi sebanyak 26 WNI dari Afganistan, dengan rincian 16 staf Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Kabul dan 10 WNI lainnya (Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, 2021).

Indonesia Abstain pada Voting Penangguhan Keanggotaan Rusia dari Keanggotaan Dewan HAM

Berdasarkan situs web resmi PBB, Majelis Umum PBB telah melakukan pemungutan suara untuk menanggukkan keanggotaan Rusia dari Dewan Hak Asasi Manusia (HAM). Resolusi itu menghasilkan dukungan suara dari 93 negara, 58 negara abstain 24 negara memilih untuk menentang resolusi tersebut. Indonesia sendiri merupakan salah satu negara yang memilih untuk abstain (United Nation, 2022).

Hasil Voting PBB tentang Keanggotaan Rusia di Dewan HAM



Gambar 2. Hasil Voting terkait Penangguhan Keanggotaan Rusia dari Dewan HAM PBB (7 April 2022).

Sumber: diolah oleh penulis dari *United Nations*, April 2022.

Indonesia melalui Wakil Tetap RI untuk PBB, Arrmanatha menyampaikan sikapnya sebagaimana sejumlah negara lain yang mengikuti sidang tersebut. Indonesia ingin komisi penyelidikan internasional dari Dewan HAM PBB untuk menyelidiki lebih dahulu pelanggaran kemanusiaan di Bucha, Ukraina. Maka Indonesia tidak langsung menyetujui resolusi itu, melainkan menunggu hasil kerja penyelidikan komisi tersebut. Pernyataan yang disampaikan Arrmanatha sebagai berikut:

"Indonesia tetap teguh dalam komitmen kami untuk menghormati dan melindungi hak asasi manusia untuk semua. Prioritas kami sekarang adalah menyelamatkan nyawa dan melindungi warga sipil di Ukraina. Kami menegaskan kembali seruan kami kepada semua pihak untuk menghentikan permusuhan dan berusaha keras untuk mencapai perdamaian melalui dialog dan diplomasi. Ini adalah satu-satunya cara kita dapat mengakhiri penderitaan dan hilangnya nyawa yang tidak masuk akal di Ukraina, dan untuk

mencegah meningkatnya dampak negatif perang di luar kawasan. Jadi kita harus menghentikan perang. Dan saya ulangi, kita harus menghentikan perang sekarang. Jika tidak, kita semua akan menderita" (detik, 2022).

Sikap abstain Indonesia pada voting PBB merupakan perwujudan dari prinsip bebas aktif yang selama ini telah diterapkan oleh Indonesia. Sikap ini sebagai bentuk intelijen strategis yang mengumpulkan informasi dari hasil penyelidikan komisi penyelidikan internasional dari Dewan HAM PBB. Hasil penyelidikan tersebut dijadikan sebagai bahan untuk analisis lebih dalam guna memahami situasi yang terjadi selama invasi Rusia ke Ukraina sekaligus memetakan potensi-potensi ancaman baik yang berdampak secara umum maupun berdampak secara khusus bagi kepentingan nasional Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, Indonesia dapat menentukan kebijakan luar negeri atau sikap selanjutnya dalam rangka merespons invasi Rusia ke Ukraina dengan pertimbangan kepentingan nasional sebagai prioritas.

SIMPULAN

Kebijakan luar negeri Indonesia dalam menyikapi invasi Rusia ke Ukraina masih konsisten dalam menerapkan prinsip bebas aktif dengan mengedepankan perdamaian dunia melalui diplomasi. Kebijakan ini diiringi dengan upaya-upaya Indonesia dalam mewujudkan kepentingan nasionalnya seperti perlindungan WNI berupa evakuasi dari wilayah Ukraina hingga mengamankan sektor ekonomi imbas dari invasi atau menjaga stabilitas ketahanan pangan di Indonesia. Selain itu, sikap lain yang ditunjukkan oleh Indonesia adalah abstain dari voting PBB dengan pertimbangan menunggu hasil

penyelidikan PBB untuk menentukan sikap selanjutnya terkait Invasi Rusia ke Ukraina. Konsisten ini diharapkan mampu melewati tantangan terutama dalam forum *Group of Twenty* (G20) yang mana pada tahun ini Indonesia menjadi tuan rumahnya.

SARAN

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri mengaktualisasikan prinsip bebas aktif dengan melakukan *shuttle diplomacy* atau diplomasi bolak balik sebagai upaya mediasi dalam mewujudkan perdamaian dunia termasuk penyelesaian invasi Rusia ke Ukraina. Dari aspek akademik, telaah mengenai sikap Indonesia dalam invasi Rusia-Ukraina sebaiknya dilakukan lebih komprehensif dengan teori yang berkaitan dengan invasi tersebut sehingga akan menghasilkan solusi untuk kebijakan yang tepat bagi Pemerintah Indonesia dalam menyikapi invasi Rusia ke Ukraina.

DAFTAR PUSTAKA

- Allison, G. T. (1969). Conceptual Models and the Cuban Missile Crisis. *American Political Science Review*, 63(3), 689–718.
- Antuli, R. R., Heryadi, D., & Rezasyah, T. Analisis Peran Indonesia dalam Penyelesaian Konflik Thailand dan Kamboja Melalui Pendekatan National Role Conception. *JUPIIS: JURNAL PENDIDIKAN ILMU-ILMU SOSIAL*, 11(2), 448-458.
- Armandha, S. T. (2018). Posisi Bebas Aktif Indonesia dalam Rivalitas Tiongkok dan Amerika Serikat di Asia Tenggara terkait Pengadaan Alutsista. *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, 6(3), 117-144.
- Aura, J. (2021). Menlu Retno: Polugri Bebas Aktif Indonesia Masih Sangat Relevan. *KumparanNews*. Diakses dari <https://kumparan.com/kumparan-news/menlu-retno-polugri-bebas-aktif-indonesia-masih-sangat-relevan-1wWInZwwqno/full>.
- Buzan, B. (1991). *People, States and Fear: an Agenda for International Security Studies in the Post-Cold War*. Boulder: Lynne Rienner Publisher.
- Buzan, B., Wæver, O., Wæver, O., & De Wilde, J. (1998). *Security: A new framework for analysis*. Lynne Rienner Publishers.
- Detik. (2022). Di Balik Abstainnya RI saat Voting Penangguhan Rusia di Dewan HAM PBB. Diakses dari <https://news.detik.com/berita/d-6025271/di-balik-abstainnya-ri-saat-voting-penangguhan-rusia-di-dewan-ham-pbb?single=1>.
- Djumati, N. Y., Lengkong, J. P., & Tulung, T. E. (2020). Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia pada Pemerintahan Jokowi dalam Upaya Penyelesaian Konflik di Myanmar. *Jurnal Politico*, 9(1).
- Doty, R. L. (2006). Foreign Policy as Social Construction: A Post-Positivist Analysis of U.S. Counterinsurgency Policy in the Philippines. *International Studies Quarterly*, 37(3).
- Fauzi, G. A. (2017). Keterlibatan Indonesia Dalam Pra Mediasi Arab Saudi. *Ejurnal Ilmu Hubungan Internasional Vol* 5(4).
- Hakim, A. R. (2022). Besarnya Dampak Perang Rusia Ukraina bagi Indonesia, Harga Pangan Melonjak. *Liputan6*. Diakses

- dari
<https://www.liputan6.com/bisnis/read/4930387/besarnya-dampak-perang-rusia-ukraina-bagi-indonesia-harga-pangan-melonjak>.
- Kamal, A. H. 2017. Kepentingan Republik Indonesia Dalam Memediasi Konflik Mesir Tahun 2011-2013. Bachelor's thesis, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah. Diakses dari <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/40944/1/AKRAM%20HUSNI%20KAMAL-FISIP%20.pdf>.
- Kartini, I. (2016). Kebijakan Jalur Sutra Baru Cina dan Implikasinya bagi Amerika Serikat. *Jurnal Kajian Wilayah*, 6(2), 131-147.
- Katriona. (2022). Kemlu: Sikapi Krisis Ukraina, Indonesia Tetap Berprinsip Bebas Aktif. *Antarnews*. Diakses dari <https://www.antarnews.com/berita/2754961/kemlu-sikapi-krisis-ukraina-indonesia-tetap-berprinsip-bebas-aktif>.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. (2021). Pemerintah Berhasil Evakuasi 26 WNI dari Afghanistan. Diakses dari <https://www.kominfo.go.id/content/detail/36513/pemerintah-berhasil-evakuasi-26-wni-dari-afghanistan/0/berita>.
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2022). PRESS BRIEFING MENLU RI EVAKUASI WNI DI UKRAINA 18 MARET 2022. Diakses dari <https://kemlu.go.id/portal/id/read/3417/berita/press-briefing-menlu-ri-evakuasi-wni-di-ukraina-18-maret-2022>.
- Leon, D. A., Jdanov, D., Gerry, C. J., Grigoriev, P., Jasilionis, D., McKee, M., ... & Vågerö, D. (2022). The Russian invasion of Ukraine and its public health consequences. *The Lancet Regional Health–Europe*.
- Maksum, A. (2015). Poros maritim dan politik luar negeri Jokowi. *Andalas Journal of International Studies (AJIS)*, 4(1), 1-26.
- Matthew, G. (2020). Kepentingan Nasional Indonesia dan Diplomasi ala Indonesia Dalam Penyelesaian Konflik Rohingya. *Jurnal Hubungan Internasional*, 13(1), 39-52.
- McKee, M., & Murphy, A. (2022). Russia invades Ukraine again: how can the health community respond?. *bmj*, 376.
- Miranti, B. (2021). Prioritas Diplomasi Indonesia: Lindungi WNI di Luar Negeri. *Liputan6*. Diakses dari <https://www.liputan6.com/global/read/4648823/prioritas-diplomasi-indonesia-lindungi-wni-di-luar-negeri>.
- Pedrasan, R. (2020). Analisis Kebijakan Keamanan Indonesia di Tengah Persaingan Chinadan Amerika Serikat di Laut Cina Selatan. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, Vol 4(2).
- Pratomo, A. B. (2021). Resolusi Konflik dan Intelijen Strategis dalam Konflik Sektarian di Poso dan Ambon. *Jurnal Penelitian & Kajian Intelijen*, Vol 2(2).
- Santoso, T. A. & Marnani, C. S. (2020). Indonesia Defense Alliance Probability in the Free-Active Foreign Policy. *Technium Soc. Sci. J.*, 12, 362.
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun

2012 tentang Pangan.

United Nation. (2022). UN humanitarians call on combatants to spare Ukraine civilians as aid ramps up. Diakses dari <https://news.un.org/en/story/2022/03/1113002>.

United Nation. (2022). UN General Assembly votes to suspend Russia from the Human Rights Council. Diakses dari <https://news.un.org/en/story/2022/04/1115782>.

Yeremia, Ardhitya Eduard, et al. 2021. "Skenario Politik Luar Negeri Indonesia 2045". *LAB 45Research Report*. Jakarta: Laboratorium Indonesia 2045.

Zahidi, M. S. (2020). Analisis Kebijakan Luar Negeri Vanuatu Dalam Mendukung ULMWP Untuk Memisahkan Diri Dari Indonesia. *MANDALA: Jurnal Ilmu Hubungan Internasional*, Vol 3 (1)